



**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 FINAL ATAS PERSEWAAN  
TANAH DI PTPN XI (PERSERO) PG. SEMBORO**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER



Asal:	Halimah	Klass
	Perpustakaan	336.24
Terima Tgl :	05 MAR 2002	IRA
Oleh :	No. Induk 0508	P
	KLA 12 / PERPAJAKAN	SFS

**Nanik Irawati**  
NIM. 980903101107

Dosen Pembimbing  
**Drs. H. Soenaryo DW**  
NIP. 130 261 690

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2002

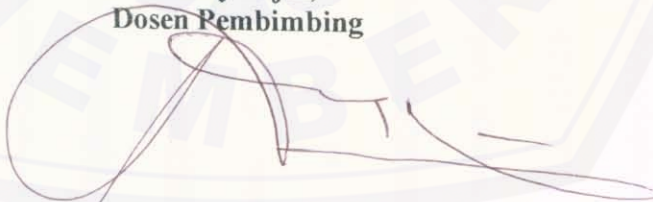
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

<b>NAMA</b>	<b>: NANIK IRAWATI</b>
<b>NIM</b>	<b>: 980903101107</b>
<b>Jurusan</b>	<b>: Ilmu Administrasi</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Diploma III Perpajakan</b>
<b>Judul</b>	<b>: Prosedur Pelaksanaan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Final Atas Persewaan Tanah Di PTPN XI (PERSERO) PG SEMBORO</b>

**Jember, 5 Februari 2002**  
**Menyetujui,**  
**Dosen Pembimbing**



**Drs. H. SOENARYO DW.**  
**NIP. 130 261 690**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : NANIK IRAWATI  
NIM : 980903101107  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan


**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH DI PT PERKEBUNAN  
NUSANTARA XI ( PERSERO ) PG SEMBORO**

Hari : Kamis  
Tanggal : 7 Februari 2002  
Jam : 15.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Anggota

Panitia Penguji

Ketna

  
Drs. ANWAR, Msi  
NIP. 131 759 528

  
Drs. H. SOENARYO DW.  
NIP. 130 261 690

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832



**MOTTO**

Karena sesungguhnya kesulitan itu disertai kemudahan, sesungguhnya kesulitan itu disertai kemudahan

(QS. Al Insyirah: 6-7)

Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih berarti daripada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi

(Kahlil Gibran)

Barang siapa yang tidak mencari dan meminta nasehat dia adalah orang bodoh. Kebofohannya membutakan matanya dari kebenaran dan menjadikannya jahat, keras kepala, dan berbahaya bagi sesama manusia.

(Kahlil Gibran)



## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan pada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran hingga terselesaikannya laporan ini.
- ❖ Ayah dan Bunda tercinta atas do'a nasehat dan dukungannya
- ❖ Adikku Lita tersayang atas kritiknya selama ini.
- ❖ M. Yusuf Mustika Kurniawan yang telah memberiku dorongan dan motivasi serta telah banyak membantu penulis dalam kelancaran penulisan laporan ini. Terima kasih atas segalanya.
- ❖ Sahabat-sahabatku, khususnya teman-teman seperjuanganku.
- ❖ Alnmater tercinta FISIP Universitas Jember Diploma III Perpajakan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta kemudahan yang diberikan, sehingga laporan PKN ini dapat terselesaikan. PKN ini berjudul Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Final atas Persewaan Tanah di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro 2001.

Laporan PKN ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan Akademik pada Program Diploma III FISIP Universitas Jember untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Dalam menyusun Laporan PKN ini, penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ahmad Toha, MSi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Didik Eko Julianto, selaku Dosen Wali Penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. H. Soenaryo DW, selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan laporan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pembina mata kuliah, segenap bagian Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Ratono, BSc selaku Administratur di PTPN XI (Persero) PG Semboro.

8. Bapak Drs. H.M. Aboe Zairi, selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang di PTPN XI (Persero) PG Semboro.
9. Ibu Dra. Endah Kusumaningrum, selaku Aspiran Pembantu Employe Kantor.
10. Bapak Sugiono, bagian Administrasi Keuangan dan Umum menangani masalah Persewaan Tanah yang telah rela membimbing Penulis dengan sabar, banyak membantu dalam memberikan penjelasan dan membantu dalam perolehan data untuk pembuatan laporan ini.
11. Segenap staf dan karyawan di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro yang telah membantu dalam pelaksanaan praktek magang.
12. Ayah dan Ibunda tercinta atas curahan kasih sayang yang telah memberikan do'a , semangat, bekal, dan perhatian dalam menyelesaikan laporan magang ini.
13. Adikku tersayang yang telah memberikan kritikan, dorongan dan motivasi dan kesuksesan penulis.
14. Rekan-rekan di PG Semboro (Rini, Elmi, Dik Uut, Dik Arip) terima kasih atas persahabatan dan pengalaman juga bantuannya selama ini.
15. Orang yang sangat berarti dalam hidupku, serta sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan demi penyelesaian laporan ini.
16. Teman-temanku yang ada di Jalan Jawa IV/19 dan Jalan Jawa IV/7B serta teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
17. Sahabat serta teman-temanku seangkatan dan seperjuangan di Program Diploma III Perpajakan Angkatan '98 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

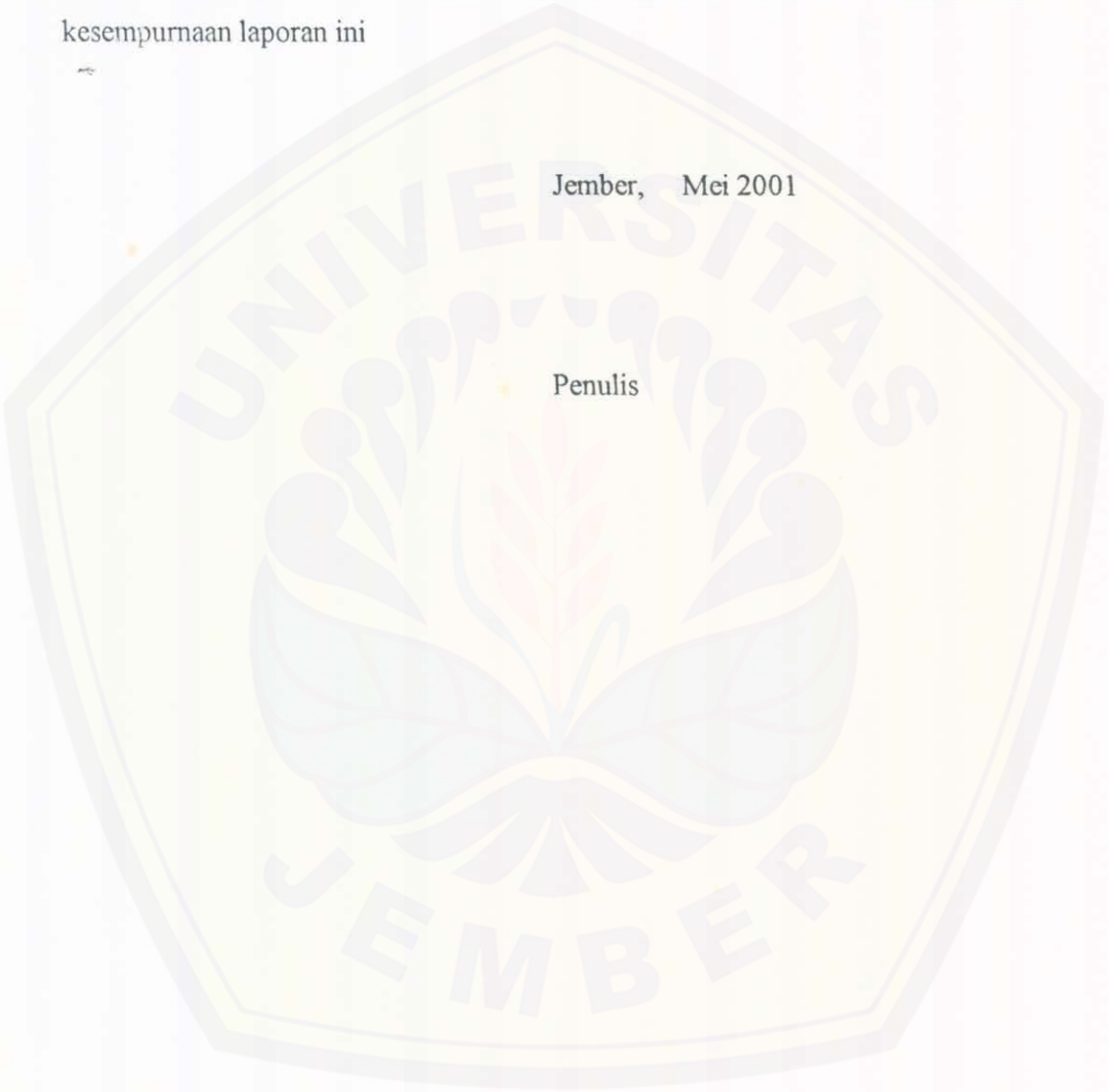
Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai balas jasa, penulis hanya dapat memberikan doa semoga semua kebaikan dan jerih payah yang telah diberikan menjadi suatu amal dan mendapat amal yang sesuai dari Tuhan YME.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik susunan materinya maupun mutu laporannya, karena mengingat kemampuan penulis dalam menyusun laporan ini sangat terbatas. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini

Jember, Mei 2001

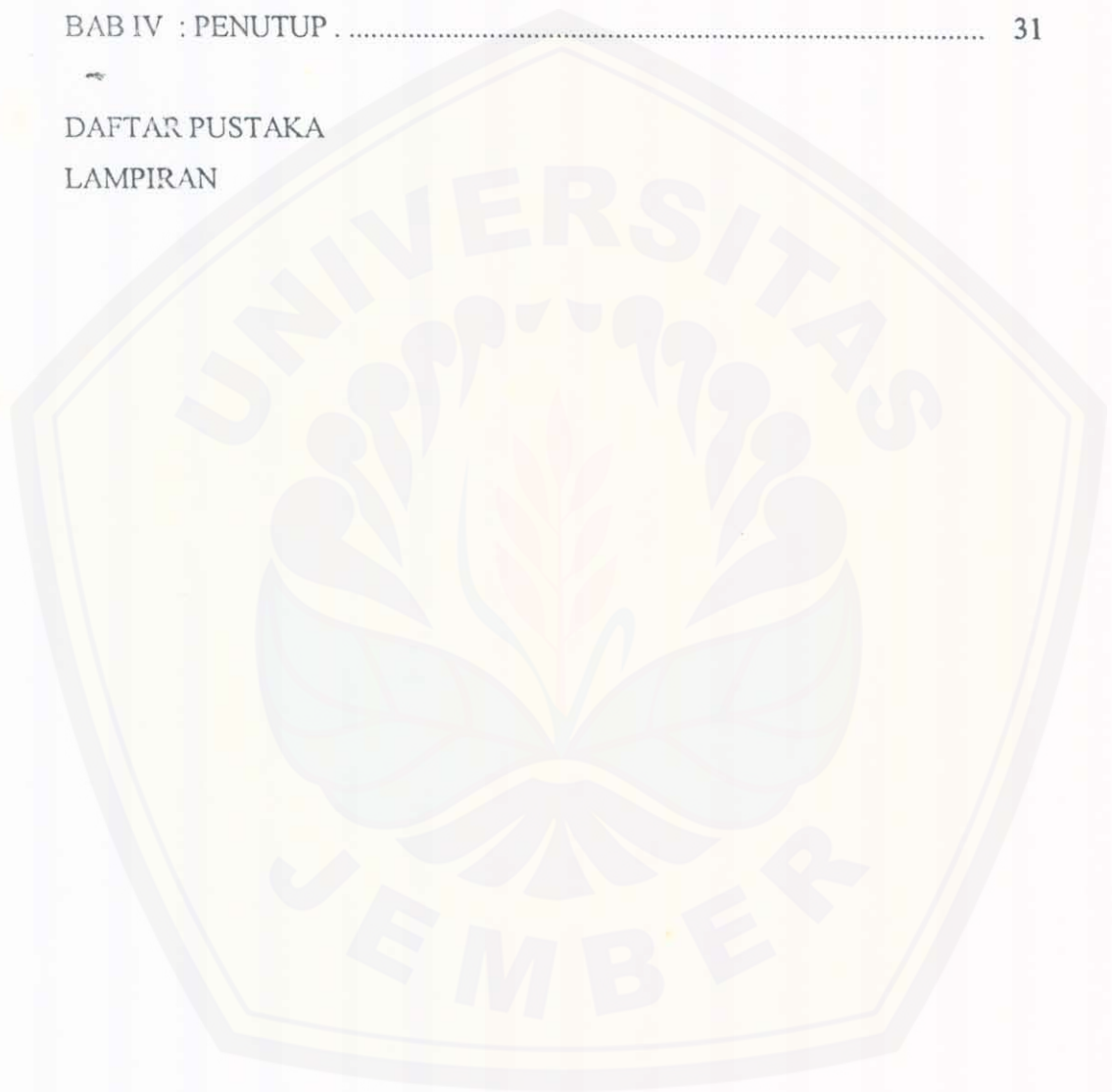
Penulis



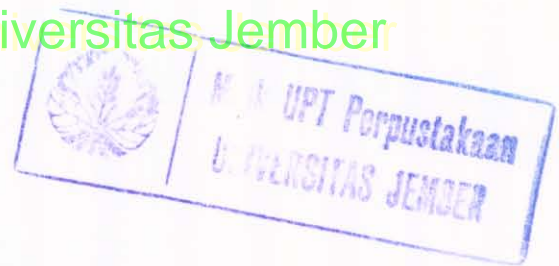
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKN (Magang).....	2
1.2.1 .... Tujuan PKN (Magang).....	2
1.2.2 .... Manfaat PKN (Magang).....	2
1.3 Objek dan Waktu Pelaksanaan PKN.....	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	4
2.1 Sejarah Singkat Pabrik Gula (PG) Semboro.....	4
2.2 Pemekaran Kapasitas .....	5
2.3 Struktur Organisasi .....	5
2.4 Fungsi dan Tanggung Jawab Bagian Administrasi Keuangan dan Umum .....	6
2.5 Aspek Personalia PG Semboro.....	8
2.5.1 ..... Status Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan.....	8
2.5.2 ..... Jumlah Karyawan PG Semboro .....	9
2.5.3 ..... Hak-hak Karyawan .....	9
2.5.4 ..... Penghitungan Gaji/ Upah Karyawan.....	13
2.6 Proses Penghitungan SPT.....	13
2.7 Hasil Produk PG Semboro.....	16

BAB III : PELAKSANAAN PKN.....	18
3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN .....	18
3.2 Penilaian terhadap Kegunaan Lembaga (Tempat PKN) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya .....	29
 BAB IV : PENUTUP . .....	 31
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	







## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan jangka panjang dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri yang berteknologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian harus lebih dimaksimalkan karena meningkatnya perekonomian BUMN dan perusahaan swasta akan memberikan kontribusi penerimaan yang besar pada negara. Tantangan era globalisasi dan era bebas pada masa mendatang yang disertai dengan persaingan yang tinggi menuntut kesiapan semua perusahaan atau organisasi bisnis baik perusahaan atau organisasi bisnis industri, jasa, maupun industri manufaktur. Artinya mau tidak mau perusahaan atau organisasi bisnis harus mampu mandiri dan siap bersaing dalam segala aspek, baik dari segi organisasi maupun administrasi. Setiap perusahaan atau organisasi bebas merancang dan merencanakan masa depannya dengan mengarahkan sumberdaya, baik Human Resources dan Non Human Resources (SDM/ NON SDM) sesuai tujuan masing – masing perusahaan.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan cara meningkatkan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan tentang dunia kerja. Dimana SDM sebagai salah satu aspek kompetitif perusahaan dan sebagai subjek atau penggerak perusahaan dalam mengatur dan melaksanakan perangkat – perangkat perusahaan.

Mahasiswa sebagai elemen kerja / SDM harus siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Dalam hal ini dituntut tidak hanya menguasai teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, tapi harus menguasai keterampilan – keterampilan khusus dalam lingkungan kerja yang bisa diperoleh melalui aplikasi dalam program PKN ( MAGANG ), sehingga ada keseimbangan dalam tataran konsep dan tataran praktis yang akan sangat bermanfaat setelah penyelesaian pendidikan formal dari Universitas.

Dengan alasan untuk memperoleh keterampilan praktis dalam perusahaan atau organisasi bisnis serta untuk mengaplikasikan teori – teori yang kami peroleh dalam dunia kerja yang sebenarnya khususnya Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 Final atas Persewaan Tanah, maka kami mengajukan PKN (Magang ) di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG. Semboro yang menangani masalah Pajak Penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 23 final atas Persewaan Tanah.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat PKN ( Magang )

### 1.2.1 Tujuan PKN ( Magang )

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 final atas Persewaan Tanah di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG. Semboro.
- b. Untuk mempraktekkan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 final atas Persewaan Tanah di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG. Semboro.
- c. Untuk memperoleh pengalaman serta studi tambahan ditempat magang khususnya yang berhubungan dengan pajak.

### 1.2.2 Manfaat PKN ( Magang )

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang Prosedur Pengenaan PPH Pasal 23 final atas Persewaan Tanah di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero ) PG. Semboro.
- b. Untuk memperoleh pengalaman praktis yang berhubungan dengan Prosedur Pengenaan dan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 final atas Persewaan Tanah di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG. Semboro.

## 1.3 Objek dan Waktu Pelaksanaan PKN

Pelaksanaan PKN berlangsung selama satu bulan efektif di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG. Semboro bagian Administrasi dan Keuangan Umum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) yaitu mulai tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan tanggal 12 April 2001. Jam kerja PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG. Semboro yaitu :

Senin sampai Kamis	: Pukul 06.30 – 15.00 WIB
Jumat	: Pukul 06.00 – 11.00 WIB
Sabtu	: Pukul 06.30 – 11.30 WIB
Istirahat	: Pukul 11.30 – 12.30 WIB







## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Pabrik Gula ( PG ) Semboro

PG Semboro didirikan pada tahun 1921 oleh HVA ( Handles Vereniging Amsterdam ) sebagai pemilik swasta dari Negeri Belanda, dengan kapasitas 24.000 kuintal tebu tiap 24 jam.

Pada tahun 1928 pabrik siap dan mulai menggiling tebu. Tahun 1930 sampai dengan 1932 pabrik mulai giling dengan kapasitas penuh dengan luas lahan 2.103 ha. Pada tahun 1933 sampai dengan 1937 aktivitas terhenti, sedangkan pada tahun 1938 giling kembali dengan luas lahan 1.271,4 ha.

Sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 kegiatan terhenti akibat pendudukan Jepang, PG emboro dijadikan pabrik soda. Sesudah Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga akhir 1945 PG Semboro dijadikan pabrik amunisi untuk mensuplai persenjataan para pejuang. Selama itu PG Semboro mengalami kerusakan sehingga harus diadakan perbaikan sesudah masa perang kemerdekaan. Daerah Jember sebelum PD ke II, memiliki 3 pabrik gula yaitu :

1. PG Semboro di Kecamatan Tanggul ( pada waktu itu )
2. PG Gunungsari di Kecamatan Kencong
3. PG Bedadung di Kecamatan Balung

Ketiga pabrik ini pada pendudukan Jepang mengalami kerusakan dan dari sisa –sisa ini dibangun kembali PG Semboro dengan kapasitas 24.000 kuintal tebu per hari.

Sejak 1950 PG Semboro diaktifkan kembali sampai dengan berakhirnya penguasaan bangsa asing pada 1957, pada waktu itu perusahaan – perusahaan asing diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Diambil alih Pemerintah Republik Indonesia sampai tahun 1968, PG Semboro termasuk dalam PPN Inpektorat VIII, berkedudukan di jalan Jembatan Merah Surabaya bersama dengan PG De Maas, PG Wringinanom, PG Olean, PG Pandji, PG Asembagus, PG Pradjekan.

Sejak masa giling 1969 sampai dengan 1975, PG Semboro termasuk dalam PNP XXIV bersama PG Kedawoeng, PG Wonolongan, PG Gending, PG Padjarakan, dan PG Djatiroto.

Sejak tahun 1975 dengan penggabungan PNP XXIV dan XXV, PG Semboro termasuk dalam lingkup PT Perkebunan XXIV – XXV ( Persero ) yang berkedudukan di Jalan Merak No. 1 Surabaya.

Sejak 11 Maret 1966 PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) dijadikan satu, yang meliputi 17 Pabrik Gula, 4 Rumah Sakit, 1 Pabrik Karung, dan 1 Pabrik Alkohol dan Spirtus di wilayah PT Perkebunan XXIV – XXV ( Persero ) dan PT Perkebunan XX ( Persero ).

## 2.2 Pemekaran Kapasitas

Tahun 1978 PG Semboro mengalami pemekaran kapasitas 24.000 kuintal tebu per hari menjadi 48.000 kuintal tebu per hari dengan perubahan proses dari karbonatasi rangkap menjadi sulfitasi.

Walaupun pemekaran kapasitas sejak 1978, akan tetapi pada tahun itu baru merupakan masa uji coba mesin – mesin maka praktis pemekaran ini pada tahun 1979, yaitu sampai tahun PELITA III.

Sejak 1982 / 1983 kapasitas dari 48.000 kuintal per hari ditingkatkan menjadi 54.000 kuintal per hari.

## 2.3 Struktur Organisasi

PG. Semboro merupakan salah satu perkebunan dalam lingkup PTPN XI (Persero) berada dibawah pengawasan Direksi yang berada dikantor pusat PTPN XI di Surabaya. PG Semboro dikepali oleh seorang Administratur yang berkedudukan di Semboro. Administratur bertanggung jawab pada Direksi PTPN XI (Persero) atas unit yang dipimpinnya.

Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan PTPN XI ( Persero ) PG Semboro harus sudah memiliki NPWP. NPWP adalah suatu sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 1.001.674.9.626



Dalam pelaksanaan tugas – tugas pekerjaan suatu instansi membutuhkan pengorganisasian yang baik. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk mencapai tujuan suatu instansi perlu menetapkan orang – orang yang menduduki suatu jabatan sehingga terjalin hubungan antara satu dengan yang lain.

Struktur organisasi merupakan salah satu kerangka yang dapat menunjukkan segenap tugas pekerjaan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi. Adapun struktur organisasi yang ada pada PG Semboro dapat dilihat pada tabel lampiran.

#### **2.4 Fungsi dan Tanggung Jawab Bagian Administrasi Keuangan dan Umum**

Administratur

Membawahi :

1. Kepala Tanaman
2. Kepala Administrasi dan Keuangan
3. Kepala Instalasi
4. Kepala Pabrikasi

*Fungsi dan Tanggung Jawab :*

- a. Memimpin, mengkoordinasi dan menggerakkan seluruh karyawan.
- b. Mengawasi segala kegiatan sehingga dapat mengetahui beberapa pemasukan dan pengeluaran baik ekstern maupun intern.

##### **1. Kepala Tanaman**

Membawahi :

1. Kepala Tebang dan Angkut
2. Kepala Litbang
3. Sinder Kebun Kepala (Kepala Tanaman Rayon)
4. Sinder Kebun Wilayah

*Fungsi dan Tanggung Jawab :*

- a. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bidang tanaman dari membuka lahan, pengadaan bibit sampai panen.
- i. Mengawasi program kerja tanam.
- c. Mempertanggung jawabkan perolehan areal dan produksi dibagian tanaman kebun.



## 2. Kepala Administrasi dan Keuangan

Membawahi :

1. Staf HAK ( Hukum Agraria dan Ketenaga kerjaan )
2. Staf Keuangan dan Umum
3. Staf Pembukuan
4. Staf Gudang

*Fungsi dan Tanggung Jawab :*

- a. Mengkoordinasi bagian SDM
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembukuan
- c. Membuat RKAP dan program kerja
- d. Mengkoordinasi bagian gudang material dan gudang gula

## 3. Kepala Instalasi

Membawahi :

1. Masinis
2. Bagian transportasi
3. Bagian Dok Loho Remise
4. Bagian OBM ( Order Hood Baand Material )

*Tugas dan Tanggung Jawab :*

Mempertanggung jawabkan kegiatan operasional dibidang teknik mulai dari persiapan peralatan – peralatan di pabrik termasuk maintenance.

## 4. Kepala Pengolahan / Pabrikasi

Membawahi :

1. Ajunt Kepala Pengolahan
2. Ahli Gula ( Chemiker )

*Tugas dan Tanggung Jawab :*

- a. Membantu proses pengolahan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengolahan.
- b. Mengkoordinasi penyusunan anggaran program kerja .
- c. Mengkoordinasi operasional timbangan tebu lori dan truk.
- d. Ketua pelaksanaan pemantauan limbah cair.

## 2.5 Aspek Personalia PG Semboro

### 2.5.1 Status Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan

Dalam suatu perusahaan, untuk melakukan aktivitasnya tidak lepas dari keberadaan tenaga kerja. PG Semboro sebagai salah satu unit produksi dari PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) dituntut untuk mengadakan pengelolaan tenaga kerja yang seefektif dan seefisien mungkin. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan tenaga kerja atau karyawan semaksimal mungkin, mulai dari penerimaan, pemanfaatan dan pembinaannya.

Berdasarkan sifat hubungan kerja dengan perusahaan, karyawan PG Semboro terdiri dari dua kelompok besar yaitu :

#### 1. Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu dimana pada saat dimulainya hubungan kerja didahului dengan masa percobaan tiga bulan.

#### 2. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimana pada saat dimulainya hubungan kerja tidak didahului dengan masa percobaan.

Karyawan Tidak Tetap terdiri dari :

##### a. Karyawan Kampanye

Yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan – pekerjaan dari permulaan tebu ditebang sampai diangkut dan ditimbang, pekerjaan dipenggilingan, pekerjaan diemplasemen, yang ada hubungannya dengan penggilingan tebu dan pekerjaan didalam pabrik sampai dengan penumpukan gula dalam gudang.

##### b. Karyawan Musiman Tetap

Yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan – pekerjaan dari permulaan pembukaan tanah, persiapan tanam dan pemeliharaan tebu pabrik gula sampai tebu ditebang.

##### c. Karyawan Musiman Tebangan

Yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan – pekerjaan dari permulaan tebu pabrik gula ditebang sampai dengan diangkat dan ditimbang, termasuk pekerjaan persiapan tebang, sampai pemuatan tebu diatas alat angkut.

d. Karyawan Musiman Lain - lain

Yaitu karyawan yang bekerja disekitar emplesemen namun tidak ada hubungannya secara langsung dengan proses produksi.

### 2.5.2 Jumlah Karyawan PG Semboro

Posisi sampai dengan bulan Februari 2001 ( LMG ), jumlah total karyawan PG Semboro adalah 995, yang terdiri dari :

a). Karyawan staf	: 147 orang
b). Karyawan Tetap	
-Bulanan	: 804 orang
-Harian	: -
c). KKWT ( Kontrak Kerja Waktu Tertentu )	: 144 orang
d). Pegawai Musiman Tetap	
-Bulanan	: -
-Harian	: -
	<hr/>
Jumlah	: 995 orang

Keterangan lebih lengkap tentang jumlah karyawan dan golongan – golongan karyawan yang ada di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro dapat dilihat pada tabel lampiran .

### 2.5.3 Hak – Hak Karyawan

Dalam suatu perusahaan, sebagai imbalan dari semua yang telah dikerjakan maka karyawan mempunyai hak. Adapun hak – hak karyawan yang ada pada PG Semboro adalah :

#### 1. Gaji Karyawan

Karyawan menerima gaji pokok yang besarnya disesuaikan dengan pangkat atau golongannya. Komponen gaji lainnya adalah tunjangan pokok yang terdiri dari tunjangan struktural yang besarnya didasarkan pada keaktifan



masuk kerja dan sesuai dengan golongan. Selain itu untuk jabatan tertentu, biasanya kepala bagian, juga diberikan tunjangan fungsional yang berupa tunjangan jabatan dan tunjangan representasi. Tunjangan – tunjangan tersebut besarnya didasarkan pada gaji pokok yang persentasenya telah ditetapkan oleh Menteri.

## 2. Santunan Sosial

Karyawan mendapat santunan sosial berupa :

- a. Bantuan Sewa Rumah : besarnya ditetapkan sesuai golongan
- b. Bantuan Air : besarnya 10 % dari sewa rumah
- c. Bantuan Listrik : besarnya 25% dari sewa rumah
- d. Bantuan Bahan Bakar : besarnya 15 % dari sewa rumah

## 3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang diberikan untuk karyawan terdiri dari :

### a. Perawatan Kesehatan

Perawatan kesehatan dan pengobatan bagi karyawan dan batihnya ditanggung oleh perusahaan. Yang dimaksud dengan batih disini adalah istri dan anak yang sah menjadi tanggungannya.

### b. Biaya Cuti

#### 1. Cuti Tahunan dan Tunjangannya

Karyawan yang bekerja selama satu tahun secara terus – menerus berhak atas cuti tahunan yang diberikan untuk 12 hari dengan ketentuan karyawan yang bersangkutan memperoleh tunjangan sebesar  $40\% \times$  gaji pokok.

#### 2. Cuti Panjang dan Tunjangannya

Karyawan yang bekerja selama enam tahun secara terus – menerus berhak atas cuti panjang selama satu bulan ( 30 hari ) termasuk hari libur. Karyawan yang bersangkutan memperoleh tunjangan sebesar satu bulan gaji.

#### 3. Cuti Hamil

Cuti hamil diberikan bagi karyawan wanita

#### 4. Bantuan Biaya Pemandokan



Bantuan ini diberikan bagi anak karyawan yang bersekolah diperguruan tinggi yang terpaksa mondok diluar tempat kerja orang tua / karyawan ( diluar Kabupaten Jember ).

5. Bantuan Kematian

4. Tunjangan Pelaksanaan Tugas, yang terdiri dari :
  - a. Biaya Prjalanan Dinas ( dalam / luar wilayah )
  - b. Tunjangan pisah keluarga
  - c. Tunjangan pendidikan ( dalam / luar negeri ) diberikan bagi karyawan yang bersekolah lagi atas usulan dari perusahaan
  - d. Biaya pindah
  - e. Tunjangan mewakili
5. Santunan khusus terdiri dari :
  - a. Penghargaan masa kerja 25 tahun, mendapatkan santunan 5 X gaji.
  - b. Penghargaan masa kerja 30 tahun, mendapatkan santunan 2 X gaji.
  - c. Penghargaan khusus
  - d. Penghargaan khusus berupa Tantiem diberikan pada karyawan apabila perusahaan memperoleh laba. Besarnya Tantiem diatur sendiri oleh Menteri Keuangan ( RUPS ) Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pembinaan dan Pengembangan Karyawan  
Dalam hal pembinaan karyawan, perusahaan / Direksi menyelenggarakan dalam bentuk :
  - a. Pembinaan jasmani dan rohani
  - b. Pembinaan disiplin karyawan  
Sedangkan dalam pengembangan karyawan, Direksi / perusahaan menyelenggarakan dalam bentuk :
    - a. Seminar atau loka karya
    - b. Peningkatan produktifitas
    - c. Meningkatkan keterampilan kerja, misalnya tukang las dan tukang bubut bekerjasama dengan BLK Singosari dan LPP Yogyakarta
7. Mutasi dan Perpindahan

Mutasi merupakan bagian dari pembinaan karir karyawan yang dilakukan secara menyeluruh dengan tidak dikaitkan dengan promosi atau hukuman disiplin, tetapi merupakan suatu tindakan pimpinan perusahaan demi kepentingan perusahaan maupun karyawan yang bersangkutan. Mutasi dapat berupa :

a. Mutasi Intern

Mutasi Intern yaitu mutasi antar bagian dalam perusahaan yang dilakukan dalam rangka pemberian kesempatan yang sama, penyegaran, penambahan pengetahuan dan sebagai tindakan preventif dalam pengamanan personil. Berlaku untuk golongan IA – IID.

b. Mutasi Ekstern

Mutasi Ekstern atau mutasi antar wilayah yaitu mutasi antar PG tapi masih dalam unit PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ). Perpindahan antar perusahaan dilakukan dalam rangka pemenuhan atau pengungsian tenaga yang sesuai dengan keperluan perusahaan. Berlaku untuk golongan IIIA – IVD.

8. Pemberhentian Karyawan

Pemberhentian karyawan perusahaan berdasarkan predikatnya terdiri dari :

a. Pemberhentian dengan hormat dapat terjadi dengan ketentuan :

1. Atas permintaan sendiri
2. Telah mencapai batas usia pensiun
3. Adanya penyederhanaan organisasi perusahaan
4. Meninggal dunia

b. Pemberhentian dengan tidak hormat terjadi jika:

1. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 atau terlibat dalam gerakan yang menentang negara dan pemerintah.
2. Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan jabatan.

3. Melakukan perbuatan atau pelanggaran berat terhadap larangan – larangan yang telah ditetapkan perusahaan.
9. Batas usia pensiun bagi karyawan adalah 55 tahun, kecuali untuk jabatan tertentu ( misalnya Administratur ) dapat diperpanjang dengan surat keputusan Direksi yaitu sampai usia 57 tahun.

Besarnya uang pensiun karyawan ditetapkan atas dasar :

- a. Penghasilan dasar pensiun ( PhDP )
- b. Masa kerja efektif

Hak atas pensiun berakhir jika :

Pensiunan / karyawan telah meninggal dunia

Hak pensiun gugur.

#### 2.5.4 Penghitungan Gaji / Upah Karyawan

Penghitungan Gaji / Upah Karyawan Tetap

- a. Karyawan Tetap Harian : Gaji Pokok + Tunjangan Khusus
- b. Karyawan Tetap Bulanan : Gaji Pokok + Tunjangan Khusus

Penghitungan Gaji / Upah Karyawan Kampanye

- a. Karyawan Kampanye Harian : Gaji Pokok + Tunjangan Khusus
- b. Karyawan Kampanye Bulanan : Gaji Pokok + Tunjangan Khusus

Penghitungan Gaji / Upah Untuk Karyawan KKWT dan dibayarkan 2 minggu sekali berdasarkan kontrak dari Direksi.

#### 2.6 Proses Penghitungan SPT

Surat pemberitahuan pajak tahunan PPh pasal 21 (SPT Tahunan PPh Pasal 21 ) dihitung dan diisikan pada formulir SPT tahunan PPh pasal 21 dengan cara mengisi perkolom. Adapun cara Pengisian SPT tahunan adalah sebagai berikut :

Kolom 1 : Diisi dengan gaji / upah pokok + tunjangan struktural + santunan sosial + tunjangan khusus.



Kolom 2 : Diisi dengan tunjang PPh pasal 21 yang diambil dari PPh pasal 21 yang telah disetor pada tahun yang lalu.

Kolom 3: Berisi tentang uang cuti + perawatan kesehatan + tunjangan pemondokan anak + penghargaan masa kerja ( 25 atau 30 tahun )

Kolom 4 : Untuk PG Semboro tidak diisi karena tidak ada

Kolom 5 : Premi asuransi

asuransi ekawarsa + asuransi beban perusahaan ( jasa tania ) + iuran jamsostek + iuran pensiun.

Untuk iuran jamsostek besarnya ditetapkan  $4,24 \% \times$  gaji pokok, sedangkan untuk iuran pensiun besarnya ditetapkan  $4,58\% \times$  penghasilan dasar pensiun ( gaji inpassing 1 Januari 2001 ).

Kolom 6 : Penerimaan dalam bentuk natura yang berupa pakaian dinas dan gula icip – icip yang dirupiahkan. Besarnya jumlah gula icip – icip ditetapkan setiap orang 6 kg gula per bulan.

Kolom 7 : Merupakan jumlah dari No. 1 sampai No. 6

Kolom 8 : Tantiem, bonus, dan lain – lain yang terdiri dari japro, THR, apresiasi dan bonus.

Kolom 9: Merupakan jumlah penghasilan bruto yang didapat dari penjumlahan No.7 dan No.8

Kolom 10: Biaya jabatan , besarnya biaya jabatan didapat dari  $5\% \times$  jumlah pada No.7 dan maksimal besarnya biaya jabatan adalah Rp 1.296.000.

Kolom 11: Biaya jabatan  $5\% \times$  jumlah yang ada pada No.8 ( inclusive No.7) yang besar maksimalnya Rp 1.296.000.

Maksudnya disini adalah jika pada No.10 besarnya kurang dari Rp 1.296.000 maka No.11 diisikan kekurangan dari itu. Jika pada No.10 besarnya sudah mencapai Rp 1.296.000 maka No. 11 tidak diisi.

Kolom 12: Astek ( Asuransi Tenaga Kerja )

Merupakan asuransi bagi karyawan yang diberikan sesuai dengan jabatan atau golongan yang terdiri dari iuran pensiun sebesar 10,85% dan iuran jamsostek sebesar 6,85% ( jaminan kematian, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua ).

Kolom 13: Merupakan jumlah pengurangan yang didapat dari penjumlahan pada No.10 ,11 dan 12.

Kolom 14: Jumlah penghasilan neto yang didapat dari jumlah No.9 dikurangi No.13

Kolom 15 : Untuk PG Semboro tidak diisi

Kolom 16 : Pembulatan jumlah yang ada pada No.14 kedalam ribuan penuh

Kolom 17 : PTKP

Besarnya PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ) didasarkan pada banyaknya tanggungan.

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut:

- a). Untuk Wajib Pajak ( WP) sendiri : Rp 2.880.000
- b). Status Kawin ( Istri ) : Rp 1.440.000
- c). Tanggungan anak : Rp 1.440.000

Besarnya PTKP berdasarkan status dan banyaknya jumlah tanggungan :

- a). Tidak kawin (TK / -) : Rp 2.880.000
- b). Kawin tanpa anak ( K / - ) : Rp 4.320.000
- c). Kawin dengan satu anak ( K / 1 ) : Rp 5.760.000
- d). Kawin dengan dua anak ( K / 2 ) : Rp 7.200.000
- e). Kawin dengan tiga anak ( K / 3 ) : Rp 8.640.000

Banyaknya tanggungan anak dibatasi maksimal 3, artinya meskipun seorang karyawan memiliki anak 5, tetapi yang dihitung untuk PTKP adalah 3 anak yang sah yang menjadi tanggungannya.

Kolom 18 : PKP ( Penghasilan Kena Pajak )

PKP merupakan dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 yang didapat dari jumlah No.16 dikurangi dengan jumlah pada No.17

Kolom 19 : Dan kolom 20 pada PG Semboro tidak diisi

Kolom 20: -

Kolom 21 : PPh pasal 21 terutang

Merupakan besarnya pajak PPh pasal 21 yang terutang oleh karyawan yang besarnya didapat dari No 18 yaitu PKP dikalikan dengan tarif sebesar 5%.

Kolom 22 : PPh pasal 21 yang telah dibayar yang isinya sama dengan No 2.

Kolom 23 : PPh pasal 21 kurang bayar / lebih bayar

PPh kurang bayar terjadi jika PPh yang terutang ( No 21 ) lebih banyak dari jumlah PPh yang telah dibayar No 22 dan sebaliknya PPh lebih bayar terjadi jika PPh terutang ( No 21 ) lebih kecil dari PPh yang telah dibayar ( No 22 ).

### 2.7 Hasil Produk PG Semboro

Selama proses produksi PG Semboro menghasilkan produk utama yaitu gula pasir. Selain itu dari proses produksi dihasilkan ampas ( bagasse ), blotong ( filter cake ), dan tetes ( final mollasses ).

#### 1. Ampas

Didalam tebu terdapat ampas dan nira. Ampas yang keluar dari gilingan akhir masih mengandung air dan zat kering. Air didalam ampas terdiri dari air imbibisi dan air yang bersal dari tebu.

Ampas yang dihasilkan oleh PG Semboro digunakan untuk bahan bakar ketel, bahan pencampur nira kotor di bagassilo dan dikirim ke PT Leces diambil sabutnya saja, sedangkan pith-nya dikembalikan lagi ke PG Semboro untuk bahan bakar ketel.

#### 2. Blotong

Merupakan hasil pemisahan di stasiun pemurnian nira kotor yang bersal dari bejana pengendap ( Ingle Tray Clarifier ) terlebih disaring di Vacuum Filter untuk dilakukan pemisahan antara blotong dan nira tapisnya. Nira tapis ditarik kembali dan ditampung pada peti nira mentah tertimbang, sedangkan blotongnya diangkut dengan lori pengangkut blotong , yang selanjutnya dibuang diluar emplasemen pabrik.

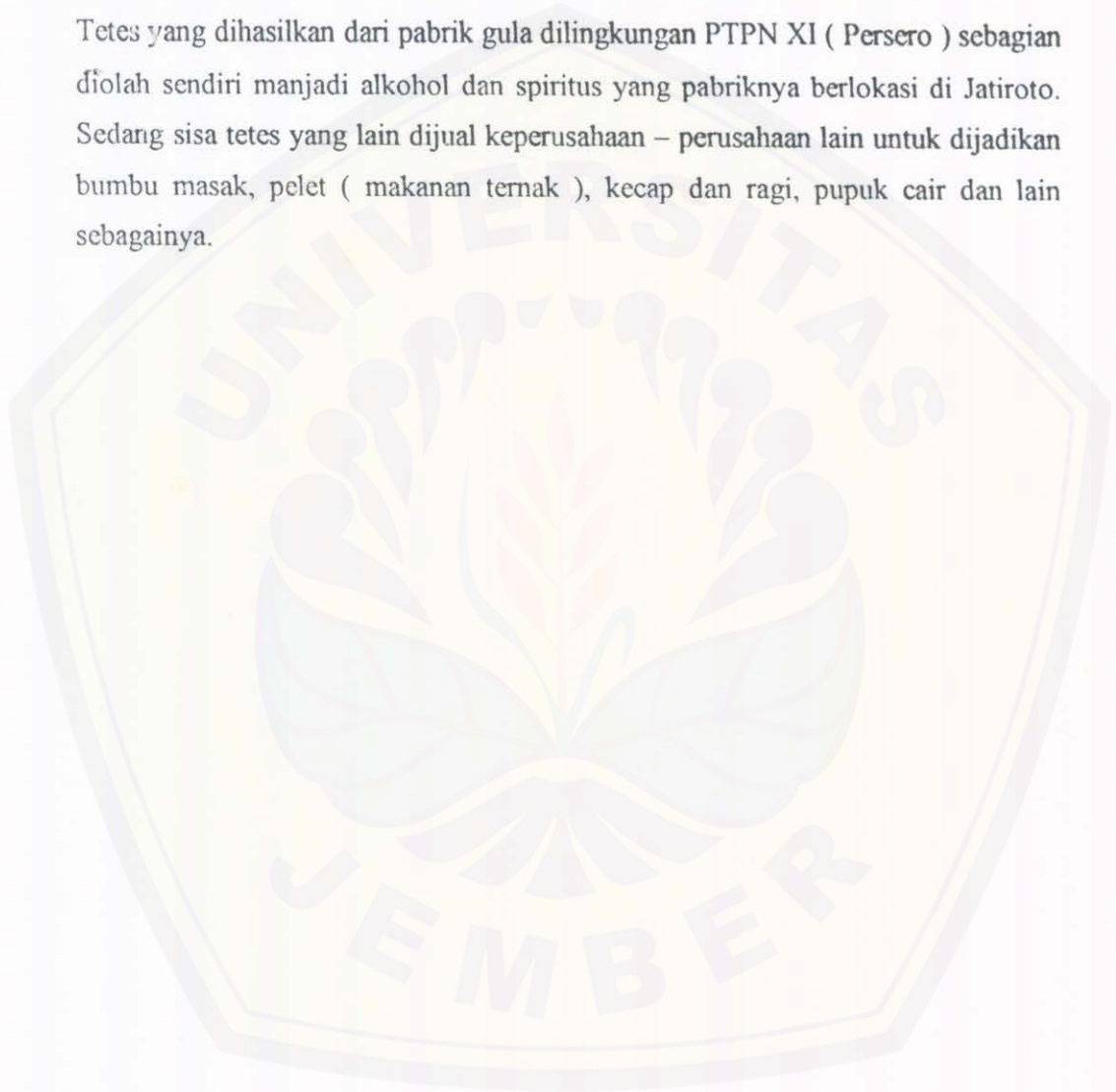
Blotong yang dicampur dengan abu ketel dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang berfungsi untuk konservasi lahan, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas pencadangan air, dan menambah unsur hara. Selain itu



blotong juga dapat digunakan sebagai bahan bakar, karena blotong mengandung biogas.

### 3. Tetes

Merupakan larutan sisa yang tidak bisa lagi dimasukkan kedalam proses untuk diambil kristalnya. Tetes juga merupakan hasil samping dari pabrik gula. Tetes yang dihasilkan dari pabrik gula dilingkungan PTPN XI ( Persero ) sebagian diolah sendiri menjadi alkohol dan spiritus yang pabriknya berlokasi di Jatiroto. Sedang sisa tetes yang lain dijual keperusahaan – perusahaan lain untuk dijadikan bumbu masak, pelet ( makanan ternak ), kecap dan ragi, pupuk cair dan lain sebagainya.





### BAB III PELAKSANAAN PKN

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Selama Praktek Kerja Nyata kegiatan yang telah dilakukan di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro berhubungan dengan Prosedur Pengenaan dan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Final Atas Persewaan Tanah di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro bagian Administrasi Keuangan dan Umum.

##### Minggu pertama

Perkenalan dengan Kepala Staf dan karyawan pelaksana bagian Administrasi Keuangan dan Umum. PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro merupakan salah satu unit perkebunan dalam lingkup PTPN XI (Persero) berada dibawah pengawasan Direksi yang berada dikantor Pusat PTPN XI di Surabaya. PG Semboro dikepalai oleh seorang Administrator yang berkedudukan di Semboro. Administrator membawahi Kepala Tanaman, Kepala Administrasi dan Keuangan, Kepala Instalasi, dan Kepala Pabrikasi. Administrator bertanggung jawab pada Direksi PTPN XI (Persero) atas unit yang dipimpinnya.

Kegiatan selanjutnya memperoleh penjelasan Gambaran Umum PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro mengenai :

1. Sejarah singkat PG Semboro
2. Pemekaran kapasitas
3. Struktur organisasi
4. Fungsi dan tanggung jawab bagian Administrasi Keuangan dan Umum
5. Aspek personalia PG Semboro meliputi :
  - a. Status hubungan kerja karyawan dengan perusahaan
  - b. Jumlah karyawan
  - c. Hak – hak karyawan

- d. Penghitungan gaji dan upah karyawan
6. Proses penghitungan SPT.
7. Hasil / produk PG Semboro.

#### **Minggu kedua**

Memperoleh penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 23 secara umum sebagai berikut:

1. Pengertian PPh pasal 23.

Merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan / terutang oleh Badan Pemerintah, atau Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.



2. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23

↓  
Dilakukan pada saat dan di tempat pembayaran

↓  
Bukti pemotongan ( untuk pemotongan bunga simpanan koperasi digunakan bukti pemotongan PPh pasal 23 final Form K.P PPh 2.7 / BP - 96 )

↓  
K.P PPh 2.6 / BP - 96  
atau  
K.P PPh 2.8 / BP - 96

3. Bukti Pemotongan

Bukti Pemotongan

Final ( K.P PPh 2.7 / BP - 95 )      Tidak Final  
K.P PPh / 2.6 / BP - 95  
K.P PPh 2.15 / BP - 96

↓  
Bunga Simpanan Koperasi

4. Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Jumlahkan PPh pasal 23 dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwim

Disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak

Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

5. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Mengisi dengan lengkap dan benar ( Rangkap 3 )

- SPT Masa PPh pasal 23 ( K.P PPh 1.9 / SPT - 96 )
- Laporan Pemotongan / Penyetoran PPh atas imbalan yang dibayarkan / terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri

Lampiran

- Lembar ke 3 SSP
- Lembar ke 2 bukti pemotongan
- Daftar bukti pemotongan PPh pasal 23

Ke KPP/ Kapenka → Selambat – lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya

Pada hari kerja

← Jika jatuh pada

6. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 23

- a. Undang – undang : - UU No. 6 / 1983 jo UU No 9 / 1994  
- UU No. 7 / 1983 jis UU No 7 / 1997  
dan UU No 10 / 1994
- b. Peraturan Pemerintah : PP No 47 / 1994

- c. Kep. Men. Keu : - No. 522 / KMK. 04 / 98  
 - No. 606 / KMK. 04 / 94 jo. No 251/KMK.04 / 95
- d. Kep. Dirjen : - No. Kep – 50 / PJ./1994  
 - No. Kep – 128 / PJ./ 1997
- e. SE. Dirjen : - No. SE – 04 / PJ. 4 / 1995  
 - No. SE – 43 / PJ. 43 / 1998  
 - No. SE – 08 / PJ. 4 / 1995  
 - No. SE – 25 / PJ. 4 / 1995  
 - No. SE – 28 / PJ. 43 / 1995  
 - No. SE – 08 / PJ. 313 / 1995  
 - No. SE – 13 / PJ. 43 / 1997

7. Perkiraan Penghasilan Neto Sebagai Dasar Pemotongan PPh Pasal 23

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh berdasarkan PP. No 29 tahun 1996, dengan tarif 40%.
- b. Imbalan Jasa, dengan tarif 40%
- Teknik Manajemen
  - Perancang interior dan perancang pertamanan
  - Akuntansi dan pembukuan
  - Penebangan hutan
  - Penilai dan aktuaris
- c. Imbalan Jasa  
 Pembasmian hama dan pembersihan dengan tarif 10%
- d. Imbalan Jasa ( 30 % )
- Pengeboran dibidang migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT
  - Penunjang dibidang penambangan migas
  - Selain migas
- e. Imbalan Jasa Perantara (60%)
- f. Imbalan Jasa selain No. 2,3,4 dan 5 kecuali jasa konstruksi dan konsultan yang telah dikenakan PPh berdasar PP. No. 73 / 96 yang pembayarannya dibebankan pada APBN / APBD ( 10%)



Kegiatan selanjutnya adalah memperoleh penjelasan mengenai persewaan tanah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Persewaan Tanah

- a. PP No. 29 / 1996, tanggal 18 April 1996
- b. Kep.Men.Keu No. 394 / KMK.04 / 1996, tanggal 5 Juni 1996
- c. SE Dirjen Pajak No. SE / PJ.4 / 1996, tanggal 14 Juni 1996

2. Pengertian :

Sewa adalah penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta bergerak, misalnya kendaraan bermotor, dan harta tidak bergerak misalnya rumah, apartemen, dan gudang.

3. Ruang Lingkup :

Tanah, rumah susun, apartemen kondominium, gedung perkantoran, pertokoan atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, terutang PPh yang bersifat final.

4. Ciri – ciri Sewa :

- a. Adanya penyerahan kenikmatan atas harta yang disewa dari yang menyewakan pada pihak penyewa
- b. Adanya perjanjian sewa baik tertulis ( timbul PPh pasal 21 atas jasa notaris sebesar 6% x nilai DPP) maupun lisan.
- c. Adanya kenyataan bahwa terdapat transaksi sewa menyewa.

5. Memotong PPh atas Sewa :

BDN Pemerintah, SPDN, Penyelenggara Kegiatan, BUT, Kerjasama Operasi, Perwakilan Luar Negeri Orang Pribadi ditetapkan Dirjen Pajak

6. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan :

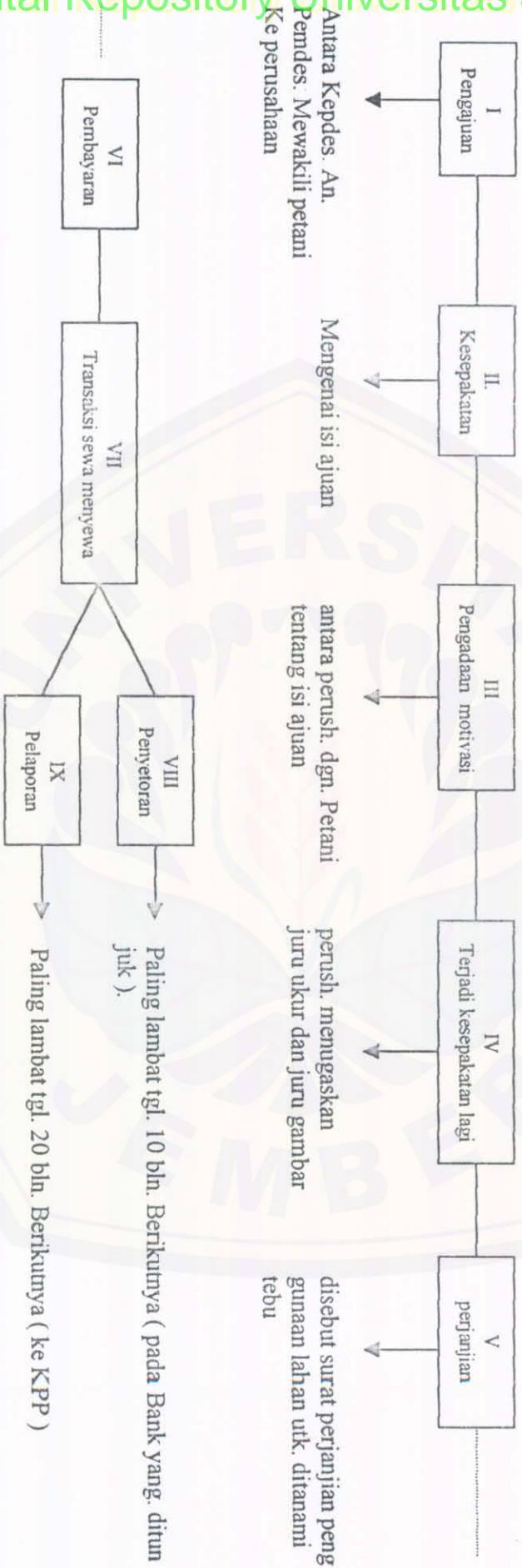
- a. Penghasilan diterima perorangan ( Hak Milik, HGU Perorangan, HGB dan Hak Pakai ) 10% x nilai sewa tidak termasuk.
- b. Penghasilan diterima badan ( HGU badan, HGB ) 6% x nilai sewa tidak termasuk.
- c. Bersifat final :
  - Jika tidak dipotong pembayar sewa, harus dibayar sendiri oleh penerima penghasilan.

- SKB tidak ada lagi
  - Wajib SPT ( bukan HPS tanah dan bangunan )
  - Tidak ada lagi uang muka PPh pasal 23
7. PPh atas penyerahan Jasa Sewa
- Tarif :  $10\% \times$  nilai sewa tidak termasuk SC
  - PPN Service Charge ( SC) =  $10\% \times 40\%$
8. Terhutang ( SE – 12 / PJ. 4 / 1996 )
- Pada saat pembayaran
  - Pada saat terhutang
9. Penyetoran
- Tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah terjadi pembayaran / termin, jika dipotong oleh pembayar sewa dengan menggunakan SSP biasa.
  - Tanggal 15 bulan berikutnya setelah terjadi pembayaran / termin jika tidak dipotong atau bukan pemotong pajak.
10. Pelaporan :
- Lampiran 1: bukti pemotongan pajak persewaan tanah dan bangunan
  - Lampiran 2: usaha pokok bukan persewaan tanah dan bangunan
  - Lampiran 3: U.P persewaan tanah dan bangunan
11. Perubahan Tarif
- UU No. 7 / 1983 , terhutang 15%
  - UU No.10 / 1994, terhutang berdasarkan perkiraan neto, tarif efektif WPDN dan BUT  $40\% \times 15\% = 6\%$
  - PP No 29 / 1996
- |                  |     |
|------------------|-----|
| Untuk badan      | 6%  |
| Untuk perorangan | 10% |

### Minggu ketiga

Kegiatan yang kami lakukan memasukkan rekapan daftar gaji yang besarnya disesuaikan dengan pangkat atau golongan, serta membuat prosedur pelaksanaan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 23 final atas persewaan tanah di PTPN XI ( Persero ) PG Semboro.

Prosedur Pelaksanaan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23  
 Final Atas Persewaan Tanah di  
 PTPN XI ( Persero ) PG Semboro





Kegiatan selanjutnya memperoleh penjelasan mengenai latar belakang terjadinya persewaan tanah di PT. Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro. Penjelasanannya sebagai berikut :

Awalnya Kepala Desa atas nama Pemerintahan Desa mewakili para petani mengajukan ke Perusahaan,dalam hal ini adalah PT Perkebunan Nusantara XI (Persero ) PG Semboro mengenai lahan atau areal yang akan disewakan. Isi dari pada ajuan tersebut anatara lain :

1. Luas lahan .
2. Letak lokasi ( dekat jalan raya, atau mudah untuk sarana transportasi ).
3. Pengairan ( pengairan teknis dan non teknis ).
4. Klasifikasi lahan ( sawah dan tegal ).
5. Pembuangan.
6. Harga dihitung per ha ( inclusive PPh dan PBB ).

Contoh :

Harga ajuan Rp 6.700.000 dengan rincian :	- harga per ha	: Rp 6.000.000
	- PPh 10%	: Rp 600.000
	- PBB	: Rp 100.000

7. PKPL ( Premi Kelancaran Pemasukan Lahan ) seperti premi desa

Ini dilakukan antara perusahaan dan pejabat yang bersangkutan

8. Swadaya LKMD ( dari desa )

Setelah isi ajuan sebagaimana tersebut diatas disepakati, PG Semboro mengadakan motivasi mengenai kesepakatan dari ajuan tersebut dengan petani di kantor desa yang ditentukan. Bila terjadi kesepakatan antara petani dan perusahaan, maka perusahaan menugaskan juru ukur dan juru gambar untuk mengukur dan menggambar lahan yang akan disewa perusahaan. Langkah berikutnya sebelum PG Semboro atau perusahaan membayar harus diadakan perjanjian yang disebut Surat Perjanjian Penggunaan Lahan Untuk Tanaman Tebu ( sesuai dengan perusahaan mau menanam komoditi apa dari lahan yang disewa ). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Administratur mewakili perusahaan sebagai pihak pertama, Kepala Desa mewakili petani sebagai pihak kedua, diketahui Kepala Wilayah atau Camat kemudian dilakukan pembayaran

persewaan oleh PG kepetani yang bersangkutan. Maka telah terjadi transaksi sewa menyewa tanah.

#### Minggu keempat

Memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan dan pengenaan pembayaran persewaan tanah di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro penjelasannya seberikut: Petani hanya menerima sejumlah harga nominal

Contoh :

Harga Rp 6.700.000, dengan rincian :

- Harga per ha ( nominal ) Rp 6.000.000
- PPh 10% Rp 600.000
- PBB Rp 100.000

Mengenai PPh dan PBB, dihimpun dan ditangani oleh PG Semboro yang selanjutnya akan dibayar kedinas perpajakan.

Memperoleh penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran persewaan tanah di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro sebagai berikut:

1. PG Semboro menyetor keuangan perpajakan / PPh - nya yang dihimpun dari petani lalu disetor pada bank yang ditunjuk. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. PG Semboro menyetorkan laporan ke kantor pajak mengenai PPh yang telah disetorkan. Pelaporan disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Mengenai laporan yang disebutkan diatas terdiri dari :

- a. Bukti pemotongan PPh atas persewaan tanah ( per petani ) dibuat rangkap 2:
  - Untuk arsip PG
  - Untuk kantor PG
- b. Laporan pemotongan dan penyetoran PPh atas persewaan tanah (hasil rekapan dari bukti pemotongan PPh atas persewaan tanah), dibuat rangkap 2:

- Untuk arsip PG
  - Untuk kantor PG
- c. SSP ( Surat Setoran Pajak )

Pengertian secara umum SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengertian SSP berdasarkan Persewaan Tanah : kumpulan dari PPh per petani pada beberapa daerah dalam 1 bulan.

Fungsi SSP :

- Sebagai sarana membayar pajak
- Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

SSP lembar 1 : Untuk Wajib Pajak / KPP sebagai bukti pembayaran

2 : Untuk KPP melalui KPKN

3 : Untuk KPP :

- Sebagai SPT untuk PPh pasal 25 yang nihil atau belum lunas
- Sebagai lampiran SPT untuk PPh pasal 25 Wajib Pajak Bank / BUMN – D / WP baru / pasal 21, pasal 22 / pasal 23, pasal 26, pasal 29 dan PPN/ PPnBM

4. : Kantor Penerima Pembayaran ( Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro )

5. : Untuk WAPU PPh pasal 22 dan PPN/ PPnBM Dirjen Bea dan Cukai .

#### **Minggu kelima**

Kegiatan yang dilakukan Minggu terakhir di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero ) PG Semboro adalah menyusun semua catatan kegiatan sebagai penyusunan laporan PKN, termasuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan PPh Pasal 23 Final Atas Persewaan Tanah di PT Perkebunan Nusantara XI ( Persero ) PG Semboro. Kegiatan selanjutnya konsultasi dengan dosen pembimbing dari perusahaan untuk memperoleh masukan – masukan dalam penyusunan laporan PKN.



### **3.2 Penilaian Terhadap Kegunaan Lembaga (Tempat PKN) Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya.**

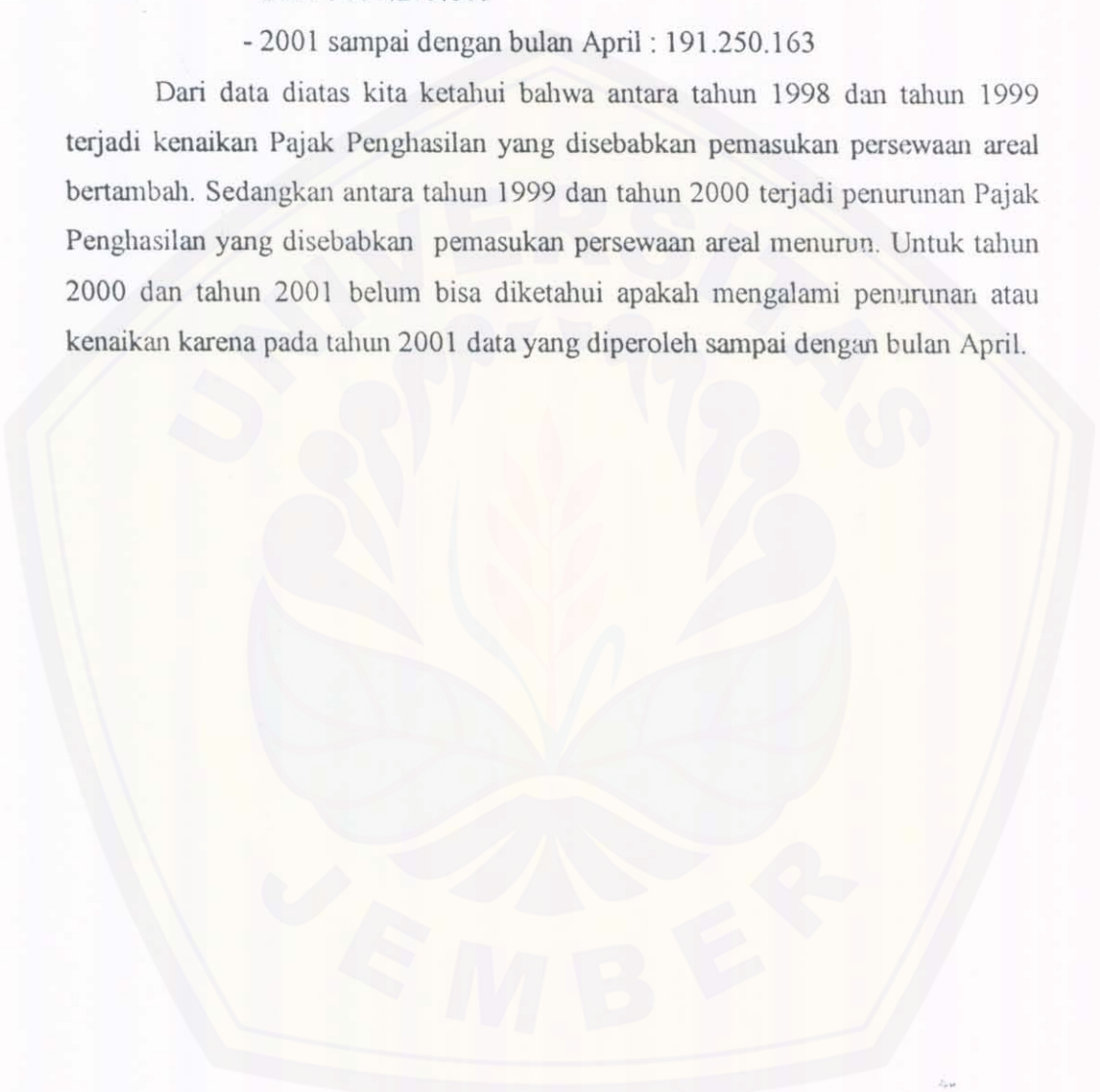
PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan perusahaan dalam membayar pajaknya. Dengan adanya perusahaan telah memenuhi kewajibannya maka negara memperoleh pendapatan yang cukup besar dari sektor pajak sebagai sumber penerimaan negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, tidak tergantung pada pinjaman yang berasal dari luar negeri. Usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menjumpai sedikitnya dua jenis kendala. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dan wajib pajak Potensial yang masih relatif rendah, sehingga selalu berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya atau sebagian besar wajib pajak potensial berusaha menghindari dari pungutan pajak. Permasalahan tersebut merupakan kendala yang pertama. Kendala yang kedua, bahwa kepemilikan dan manajemen sebagian besar perusahaan di Indonesia masih bersifat tertutup. Perusahaan tersebut umumnya belum menyadari akan pentingnya pembukuan yang baik. Padahal pembukuan yang baik bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan perpajakan, melainkan bermanfaat juga bagi manajemen perusahaan yang bersangkutan. Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawannya karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari mereka, seperti peningkatan motivasi dan prestasi kerja serta peningkatan loyalitas karyawan pada perusahaan. Oleh karena itu manajemen perusahaan lebih baik menaikkan penghasilan karyawannya daripada harus mengeluarkan uang untuk pajak.

PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro dalam sistem pemungutan pajak khususnya pajak penghasilan menggunakan Self Assesment System. Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Mengenai

SSP ( Surat Setoran Pajak ) yang disetorkan setiap tahunnya oleh PG Semboro ke kantor Pajak, khususnya SSP persewaan tanah untuk tahun:

- 1998 : 456.564.935
- 1999 : 789.022.138
- 2000 : 687.275.865
- 2001 sampai dengan bulan April : 191.250.163

Dari data diatas kita ketahui bahwa antara tahun 1998 dan tahun 1999 terjadi kenaikan Pajak Penghasilan yang disebabkan pemasukan persewaan areal bertambah. Sedangkan antara tahun 1999 dan tahun 2000 terjadi penurunan Pajak Penghasilan yang disebabkan pemasukan persewaan areal menurun. Untuk tahun 2000 dan tahun 2001 belum bisa diketahui apakah mengalami penurunan atau kenaikan karena pada tahun 2001 data yang diperoleh sampai dengan bulan April.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dengan mengucapkan puji syukur Al-Hamdulillah atas terlaksananya program Praktek Kerja Nyata ( Magang ) dan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro guna penyusunan Laporan dengan judul Prosedur Pelaksanaan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Final Atas Persewaan Tanah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan PG Semboro atas kesediaannya yang telah membantu, memberikan pelayanan dan fasilitas selama Praktek Kerja Nyata hingga terselesaikannya laporan yang penulis susun.





DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.04/1994 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 394/KMK.04/1996 tentang Ruang Lingkup Persewaan.

Ahmad Cahyono, M.F. Husaid. Oktober 1997. Perpajakan Edisi Pertama. Yogyakarta: UPN YKK..

Drs. Mardiasmo, MBA, Akt. 1997. Perpajakan Edisi Keempat Cetakan Pertama. Yogyakarta. ANDI

....., 1996. Petunjuk Praktis Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta : Berita Pajak

Manulang. 1992. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Tugas
3. Surat Keterangan
4. Laporan Posisi Tenaga Kerja
5. Contoh peta/ denah mengenai lahan atau areal yang akan disewakan
6. PKPL (Premi Kelancaran Pemasukan Lahan)
7. Daftar Pembayaran Jaminan Pendapatan Petani
8. Surat Perjanjian Penggunaan Lahan Untuk Tanaman Tebu
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Persewaan Tanah dan / Bangunan
10. Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas Persewaan Tanah dan/  
Bangunan.
11. SSP lembar 1
12. SSP lembar 2
13. SSP lembar 3
14. SSP lembar 4
15. SSP lembar 5
16. Kartu Utang/ Piutang







Surat Tugas

Number : 874 /J25.1.2/TP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama berikut ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Ridwan Kurniawan	93 - 1011	Ketua
02	Fahmi Muzayyanah	93 - 1093	Wakil ketua
03	Nuzulirrawati	93 - 1107	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PTPN XI (PERSERO) PG Semboro Jember selama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 MAR 2001

Dekan,



*[Signature]*  
Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

BOENARHAYONO, BS  
Kabang. Lentera Daya Manusia

Surabaya, 1 Maret 2001

Surabaya, 1 Maret 2001

DEKRETAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
Jalan Kalimantan - Kampus Tegalboto  
Jember

## REKTRAKTIF KEMAJUAN

Berdasarkan surat Saudara nomor 476/J25.12/PP.9/II/2001 tanggal 12 Februari 2001, dengan ini kami beritahukan bahwa Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) menyetujui kepada:

1. Ema Kusnawati NIM: 98 - 1011
2. Echa Muzakkarah NIM: 98 - 1093
3. Nanda Hayati NIM: 98 - 1107

di Universitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, untuk melaksanakan praktek kerja nyata tentang perpajakan yang berhubungan langsung dengan Perseorajaan di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) - PG Semboro, Tanggul.

1. Praktek kerja nyata tersebut sebagai berikut:
  - a. Waktu yang diberikan adalah mulai tanggal 12 Maret s.d. 12 April 2001.
  - b. Biaya lokasi untuk siswa tidak disediakan oleh PG Semboro.
  - c. Biaya yang dibebankan untuk keperluan tersebut tidak menjadi tanggungan PG Semboro.
  - d. Siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengambil data yang berhubungan dengan keuangan.
  - e. Yang bersangkutan harus menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PG Semboro.
2. Siswa tersebut melaksanakan kerja praktek selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah selesai studi wajib mengirimkan laporannya yang telah diketahui oleh pembimbing di PG Semboro serta disahkan oleh Guru Pembimbing kepada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) dalam hal ini ke Bagian Sumber Daya Manusia, PT Perkebunan Nusantara XI, Surabaya.

Ditetapkan dan dibuat di:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)



Ditujukan untuk:  
Administratur P. Semboro

SOENARRIYONO, BS  
Kabang Sumber Daya Manusia

Blom



PTPN XI

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)  
PABRIK GULA " SEMBORO "

SURAT KETERANGAN

No : XX-SURKET/01.004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratono , BSc  
Jabatan : Administratur PG. Semboro

Menerangkan bahwa mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember dibawah ini :

<u>NAMA</u>	<u>NIM</u>
Nanik Irawati	98-1107
Rini Kusnawati	98-1011
Elni Muzayyanah	98-1093

Telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PG. Semboro dari tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan 12 April 2001 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Semboro, 12 April 2001

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)  
" PG. SEMBORO "



Ratono, BSc  
Administratur



PT. PERNINGGIAN NASANTAMA NI (PERNINGGI)  
 PABRIK GULA SEMBORO

LAPORAN POSISI TENAGA KERJA

( Akhir ) Bulan Februari 2001

URAIAN	PEGAWAI GOL	PEGAWAI GOL IA-III D	PEGAWAI MGSIMAN TERAS	NON STAF	JUMLAH PEG. BLN INT		JUMLAH PEG. BLN YL		+ Tambah & Kurang	WAKTU BERKARYA	Jml. P. yg di di per
					BLN INT	BLN YL	BLN INT	BLN YL			

POSISI MENURUT COLONGAN

STAF : NON STAF :											
IV.D	II.D										
IV.C	II.C	1	27	27	29	27	27	2	29	29	
IV.B	II.B	3	86	86	89	69	20	1	28	28	
IV.A	II.A	9	198	198	207	181	26	20	89	89	
III.D	I.D	13	224	224	237	258	21	26	207	207	
III.C	I.C	6	164	164	170	197	27	21	237	237	
III.B	I.B	12	53	53	65	56	9	27	170	170	
III.A	I.A	3	23	23	44	41	3	9	65	65	
	KKWT Honor				144	143	1	1	26	26	

Jumlah bulan ybl :	47	804	804	809	809	995	999	999	999	995	999
Jumlah bulan ybl :	47	804	804	809	809	995	999	999	999	995	999
Tambah / Kurang :											

(5) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)









JAMINAN PENDAPATAN PETANI  
TEBU GILING / BIBIT TAHUN TEBANG 19...../19.....  
KEBUN .....

Total JAMINAN Inol / Excl.PDB :

..... Ha x Rp..... = Rp.....

Biaya :

Ponorima

L K M D

..... Ha x Rp..... = Rp.....

Premi Desa :

..... Ha x Rp..... = Rp.....

Premi Camat :

..... Ha x Rp..... = Rp.....

Premi Polsok :

..... Ha x Rp..... = Rp.....

Premi Dan Ramil :

..... Ha x Rp..... = Rp.....

PREMI TUTI

..... Ha x Rp..... = Rp.....







SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK TANAMAN TEBU

KATEGORI KEDUN :

No.: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Administratur Pabrik Gula Semboro PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (Perserb), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Kepala Desa : ..... mewakili para petani sesuai nama yang tercantum didalam daftar terlampir yang memiliki tanah Sawah / Tegal di desa : ..... Kecamatan : ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini : ..... tanggal ..... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berannu-sama mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Pasal. 1

PIHAK KEDUA akan menyerahkan tanahnya seluas ..... Ha seperti dalam daftar terlampir kepada PIHAK PERTAMA, untuk ditanami jenis tanaman:

Pasal. 2

PIHAK KEDUA menjamin bahwa tanah tersebut dalam pasal.1, adalah bebas dari tanah persengketaan.

Pasal. 3

Atas penyerahan tanah tersebut dalam pasal.1, PIHAK-PERTAMA akan memberikan uang Jaminan Pendapatan Petani tiap hektar sebesar Rp. ....

( ..... ) Incl. dan ..... Sedang LKMD, IKPI, maupun biaya lain - lain untuk instansi terkait akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA, langsung kepada yang bersangkutan.

Pasal. 4

Besarnya uang Jaminan Pendapatan Petani, dihitung berdasarkan atas bukti pemilikan tanah yang syah atau berdasarkan hasil pengukuran bersama.

Pasal. 5

PIHAK KEDUA setelah menerima uang Jaminan Pendapatan Petani, bersedia menyeraikan tanahnya kepada PIHAK PERTAMA untuk dikerjakan, selambat-lambatnya pada bulan : ..... 19..

Pasal. 6

PIHAK KEDUA tidak akan menuntut kenaikan uang Jaminan Pendapatan Petani, setelah pembayaran dan surat perjanjian ini ditanda tangani.

Pasal. 7

PIHAK KEDUA tidak berkeberatan atau memperbolehkan tanahnya untuk diolah secara mekanis dengan traktor, dengan tetap memperhatikan batas - batas pemilikan lahan masing-masing petani.

Pasal. 8

PIHAK PERTAMA, sesuai dengan keinginan PIHAK KEDUA, memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk belajar dan mengikuti cara bercocok tanam tebu sejak pembukaan tanah sampai dengan pelaksanaan tebang-muat dan angkut selama lahannya dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai tanaman tebu Percobaan, dengan tujuan agar PIHAK KEDUA pada saatnya mampu melaksanakan tanaman TRI sesuai dengan buku teknis.

Pasal. 9

seperti

Apabila lahan yang dipergunakan untuk tersebut pada pasal.1 diatas, terdapat tanaman-tanaman maupun galengan dan lain-lain yang dipandang mengganggu pelaksanaan teknis pada saat penanaman pemeliharaan, tebang angkut, maka PIHAK KEDUA bersedia meniadakan sendiri atau dileksanakan oleh Pabrik Gula Semboro tanpa ganti rugi.

Pasal. 10

Segala urusan / tanggungan dengan pihak lain termasuk didalamnya begasak, tanggungan Dinas dan lain - lain, selama tanah dipergunakan untuk tanaman tebu Jaminan Pendapatan Petani oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal. 11

Apabila selama tanah dalam penggunaan PIHAK PERTAMA terjadi perubahan pemilikan atas tanah atau terdapat penggantian jabatan dan hak bengkok atas tanah tersebut maka perjanjian ini tetap mengikat, yang berarti pemilik yang baru/pemegang jabatan yang baru tidak ber-hak menuntut ganti rugi.

Pasal. 12

PIHAK KEDUA sanggup membantu keamanan tanaman tebu, kelancaran air, pembeangan air dan jalan tebang.

Pasal. 13

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan/perbedaan pendapat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan berdasarkan musyawarah / mufakat dan apabila musyawarah/mufakat tidak dapat dicapai, akan diselesaikan melalui saluran hukum dengan domisili di Kantor Pengadilan Negeri.

Semboro,

19..

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Administratur

Mengetahui

Kepala Wilayah

Kecamatan : .....

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( F I N A L )**

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : .....

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. ....	<del>6%</del> /10% *)	Rp. ....

..... 19.....

Pemotong Pajak,

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Tanda tangan

- Perhatian :**
1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
  2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
  3. \*) coret yang tidak perlu.





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

## S. S. P. (SURAT SETORAN PAJAK)

LEMBAR  
untuk  
WAJIB PAJAK/PKP  
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN

A. 1. NAMA WP : ..... B. NPWP : 

4	0	7	5	2	1	7	2	6	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Alamat : ..... C. KODE CABANG : 

--	--

Jember

..... D. KODE KLU : 

3	4	1	2	0
---	---	---	---	---

E. JENIS PAJAK : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..... KODE JENIS PAJAK : 

0	1	2	1
---	---	---	---

F. JUMLAH SETORAN : Rp. .... (MAP)

DENGAN HURUF

G. JENIS SETORAN (Pilih dan Isi salah satu nomor di bawah ini)

- |   |                              |         |
|---|------------------------------|---------|
| 1. SPT Masa atau Pembetulanannya                    | : Bulan                      | 19..... |
| 2. SPT Tahunan (PPh Ps. 29/21) atau Pembetulanannya | : Tahun                      | 19..... |
| 3. STP No. : .....                                  | : Masa                       | 19..... |
| 4. SKP/SKPKB No. : .....                            | : Masa/Tahun *               | 19..... |
| 5. SKPT/SKPKBT No. : .....                          | : Masa/Tahun *               | 19..... |
| 6. PPN/PPnBM yang disetor oleh Pemungut PPN/PPnBM   | : Masa                       | 19..... |
| 7. FISKAL LUAR NEGERI : a. Nomor Paspor             | :                            | .....   |
| b. Penerbangan/Pelayaran                            | : No. .... Tgl. ....         | 19..... |
| c. Ditanggung oleh                                  | : Pribadi/Dinas/Perusahaan * | .....   |

### PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSP pada halaman belakang lembar ini.

TGL. ....  
WAJIB PAJAK/PENYETOR

DITERIMA OLEH  
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

Tanggal: .....

Tanda Tangan : .....

Nama Terang : .....

DITERIMA OLEH KPP  
Tanggal dan Paraf







DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

## S. S. P. (SURAT SETORAN PAJAK)

LEMBAR

4

untuk  
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN  
(Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro)

<p>A. 1. NAMA WP : <u>Lukito Tjandrawinata</u></p> <p>2. Alamat : <u>Jalan Sultan Agung No. 29</u> <u>Jember</u></p> <p>E. JENIS PAJAK : <u>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</u></p> <p>F. JUMLAH SETORAN : Rp. ....</p>	<p>B. NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td></tr></table></p> <p>C. KODE CABANG : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>D. KODE KLU : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr></table></p> <p>KODE JENIS PAJAK : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> (MAP)</p>	4	0	7	5	2	1	7	2	6	2	6			3	4	1	2	0	0	1	2	1
4	0	7	5	2	1	7	2	6	2	6													
3	4	1	2	0																			
0	1	2	1																				

DENGAN HURUF

G. JENIS SETORAN (Pilih dan Isi salah satu nomor di bawah ini)

1. SPT Masa atau Pembetulannya : Bulan ..... 19.....
2. SPT Tahunan (PPh Ps. 29/21) atau Pembetulannya : Tahun 19.....
3. STP No. : ..... : Masa ..... 19.....
4. SKP/SKPKB No. : ..... : Masa/Tahun \*) ..... 19.....
5. SKPT/SKPKBT No. : ..... : Masa/Tahun \*) ..... 19.....
6. PPN/PPnBM yang disetor oleh Pemungut PPN/PPnBM : Masa ..... 19.....
7. FISKAL LUAR NEGERI : a. Nomor Paspor : .....  
 b. Penerbangan/Pelayaran : No. .... Tgl. .... 19.....  
 c. Ditanggung oleh : Pribadi/Dinas/Perusahaan \*)
8. ....

<p>TGL. ....</p> <p>WAJIB PAJAK/PENYETOR</p>	<p>DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO</p> <p>Tanggal.....</p> <p>Tanda Tangan :.....</p> <p>Nama Terang :.....</p>	<p>DITERIMA OLEH KPP Tanggal dan Paraf</p>
--	---	--



**JADUAL KEGIATAN PKN**  
**PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI ( PERSERO )**  
**PG SEMBORO**  
**12 MARET 2001 – 12 APRIL 2001**

	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
<b>MINGGU I</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkenalan dengan Kepala Staf, dan karyawan pelaksana bagian Administrasi Keuangan dan Umum.</li><li>2. Perkenalan lingkungan PG Semboro</li><li>3. Memperoleh penjelasan gambaran umum PG Semboro tentang sejarah singkat PG Semboro</li><li>4. Memperoleh penjelasan gambaran umum tentang fungsi dan tanggung jawab bagian Administrasi Keuangan dan Umum</li><li>5. Memperoleh penjelasan gambaran umum tentang Aspek Personalia di PG Semboro</li></ol>
<b>MINGGU II</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat struktur organisasi</li><li>2. Memperoleh penjelasan gambaran umum tentang hasil produk PG Semboro</li><li>3. Membantu memasukkan rekapan daftar gaji</li><li>4. Membantu dalam pengisian SPT</li></ol>



MINGGU III

1. Memperoleh penjelasan secara umum tentang persewaan tanah
2. Memperoleh penjelasan tentang persewaan tanah di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro
3. Memperoleh penjelasan tentang prosedur persewaan tanah di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Semboro

MINGGU IV

1. Memperoleh penjelasan tentang fungsi lampiran dan bukti – bukti yang dibutuhkan dalam persewaan tanah
2. Memperoleh penjelasan tentang adanya surat perjanjian yang berhubungan dengan persewaan tanah
3. Membantu menyelesaikan dan mengerjakan hal – hal yang berkaitan dengan persewaan tanah di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero ) PG Semboro

MINGGU V

1. Menyusun semua catatan kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan PKN
- 2..Konsultasi dengan dosen pembimbing dari perusahaan